



Peran Daud Beureuh Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

FITRI DAYANI BATUBARA¹

Pendidikan Sejarah
Universitas Graha Nusantara
FitriFayani532@gmail.com

INSAN FAHMI SIREGAR²

Pendidikan Sejarah
Universitas Graha Nusantara
insanfahmis@gmail.com

ALI PADANG SIREGAR³

Pendidikan Sejarah
Universitas Graha Nusantara
alipadangsiregar@gmail.com

 <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v5i2.562>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Teungku Muhammad Daud Beureuh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya di wilayah Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode historis yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daud Beureuh, sebagai seorang ulama, pemimpin masyarakat, dan Gubernur Militer Aceh, memainkan peran penting dalam mengorganisasi pertahanan wilayah Aceh, mengintegrasikan laskar perjuangan ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta menggagas penggalangan dana rakyat untuk mendukung kebutuhan militer nasional, termasuk pembelian pesawat Seulawah. Namun, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak memenuhi janji otonomi daerah bagi Aceh mendorong Daud Beureuh bergabung dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah nasional serta memberikan wawasan tentang kompleksitas relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam fase awal kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan dan nasionalisme Daud Beureuh juga menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sejarah.

Article History:

Received : 12/06/2025
Revised : 18/06/2025
Approved : 22/06/2025

Corresponding Author:

FitriFayani532@gmail.com
(Fitri Dayani Batubara)

Kata Kunci : Peran, Daud Beureuh, Mempertahankan, Kemerdekaan



A. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa, menandai berakhirnya masa penjajahan dan dimulainya era kedaulatan rakyat. Namun, kemerdekaan tersebut tidak serta-merta diakui secara internasional dan masih harus dipertahankan dari upaya kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Dalam situasi tersebut, muncul peran strategis dari tokoh-tokoh daerah yang memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk dari wilayah Aceh (Latif, 2014:134).

Aceh memiliki posisi strategis dan historis dalam perjuangan bangsa Indonesia. Julukan “Serambi Mekah” tidak hanya mencerminkan kekuatan spiritual wilayah ini, tetapi juga menunjukkan peran sentral Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam konteks ini adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama karismatik, pemimpin masyarakat, dan tokoh militer yang lahir di Beureueh, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 23 September 1896 (Aman, 2015:10).

Daud Beureueh dikenal luas sebagai figur yang memadukan peran institusional dan interpersonal secara seimbang. Sebagaimana dikemukakan oleh Turner (2001:233–254), individu dalam masyarakat modern menjalankan dua bentuk peran utama secara bersamaan: peran institusional yang bersifat formal, dan peran interpersonal yang bersifat informal. Dalam konteks ini, Daud Beureueh menunjukkan kemampuan untuk menjalankan keduanya—baik sebagai gubernur militer yang menjalankan fungsi formal negara, maupun sebagai tokoh agama yang menjadi panutan sosial masyarakat Aceh.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kondisi nasional masih diliputi ketidakstabilan. Pemerintah pusat memerlukan dukungan daerah-daerah strategis untuk mempertahankan kedaulatan, termasuk dari Aceh. Masyarakat Aceh menunjukkan dukungan konkret terhadap Republik Indonesia, antara lain melalui sumbangan dana pembelian pesawat Seulawah yang menjadi simbol partisipasi Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, ketidaksesuaian antara janji pemerintah pusat dengan realitas kebijakan administratif—khususnya penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara tanpa realisasi otonomi daerah—menyebabkan kekecewaan mendalam (Adan, 2014:20).

Kekecewaan tersebut mendorong Daud Beureueh untuk menyatakan perlawanan terhadap pemerintah pusat melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Meskipun tindakan ini membuatnya dicap sebagai separatis, kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan sebelumnya tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif sejarah, langkah Daud Beureueh merupakan ekspresi dari kompleksitas relasi pusat-daerah dan refleksi ketegangan antara idealisme perjuangan dan realitas politik nasional (Suprpto, 2009:231–323).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Daud Beureueh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya dari perspektif historis dan sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif serta metode sejarah yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Dudung, 2003:53), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah nasional serta menambah wawasan mengenai peran tokoh daerah dalam proses pembentukan dan pertahanan negara kesatuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan menguraikan data sebagaimana adanya tanpa menggunakan perhitungan statistik atau kuantifikasi. Pendekatan ini sesuai untuk menggali makna, konteks, dan pemahaman mendalam terhadap peristiwa sejarah dan peran tokoh tertentu dalam dinamika sosial-politik masa lalu. Penelitian kualitatif sangat relevan dalam kajian tokoh, perilaku sosial, fungsi organisasi, dan gerakan sosial (Syahrudin, 2016:41).

Adapun metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode historis**, yang menurut Garraghan dalam Dudung (2003:53) merupakan serangkaian aturan dan prinsip sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data sejarah secara kritis dan terpadu dalam bentuk narasi ilmiah. Metode ini mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik

Tahap pertama dalam metode historis adalah heuristik, yaitu proses penelusuran dan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Istilah “heuristik” berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti “menemukan” atau “memperoleh” (Dudung, 2003:64). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh berbagai sumber tertulis dari perpustakaan di Kota Padangsidempuan, termasuk Perpustakaan Kota Padangsidempuan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk merekonstruksi peran Daud Beureueh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

b. Kritik Sumber

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas data yang telah dikumpulkan. Kritik dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. **Kritik eksternal**, yang menilai keaslian dan kondisi fisik dokumen atau sumber (misalnya waktu dan tempat penulisan).
2. **Kritik internal**, yang menilai isi atau substansi sumber dengan melihat konsistensi informasi, logika penyampaian, dan kesesuaiannya dengan data lain (Dudung, 2003:68).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kritik internal dengan cara membandingkan sejumlah sumber tertulis yang membahas sosok dan peran

Daud Beureueh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta sejarah yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang telah divalidasi. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan data yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian dan menyusun narasi yang logis dan koheren. Interpretasi berfungsi untuk memberikan makna terhadap peristiwa sejarah berdasarkan konteks sosial-politik dan ideologis yang melatarbelakanginya.

d. Historiografi

Tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi, yaitu penyusunan dan penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk laporan tertulis. Menurut Kuntowijoyo (1997:104–105), aspek kronologis dalam historiografi sangat penting untuk menunjukkan kesinambungan dan keterkaitan antar peristiwa. Dalam konteks ini, penulisan historiografi tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peristiwa masa lalu, tetapi juga memberikan pemahaman yang reflektif dan analitis terhadap kontribusi Daud Beureueh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dengan menerapkan metode historis secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan rekonstruksi sejarah yang objektif, ilmiah, dan mampu memperkaya khazanah historiografi nasional.

C. HASIL PENELITIAN

Setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta menandai berakhirnya penjajahan. Secara de jure, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, namun secara de facto, kedaulatan negara masih menghadapi tantangan berat dari kekuatan kolonial Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Nusantara melalui agresi militer (Latif, 2014: 134). Dalam kondisi penuh ketegangan tersebut, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air menjadi landasan utama dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.

Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pahlawan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa di masa kini. Generasi pascakemerdekaan dituntut untuk mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi memperkuat ideologi Pancasila dan menjaga keberagaman dalam bingkai kebhinekaan.

Penolakan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dan upaya militernya melalui Agresi Militer Belanda I dan II merupakan tantangan terbesar pada masa awal kemerdekaan. Konflik bersenjata yang terjadi pasca proklamasi menjadi ujian bagi Republik Indonesia dalam menjaga eksistensi dan identitas nasional.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, seluruh elemen bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, termasuk tokoh-tokoh strategis dari daerah seperti Daud Beureueh di Aceh.

Aceh: Konteks Historis dan Budaya Perlawanan

Aceh memiliki posisi strategis dalam sejarah perjuangan nasional. Julukan “Serambi Mekah” menggambarkan peran penting Aceh sebagai pusat spiritual Islam di Nusantara, tempat persinggahan jemaah haji menuju Tanah Suci. Sementara itu, sebutan “Tanah Rencong” merujuk pada simbol keberanian masyarakat Aceh, yang identik dengan senjata tradisional rencong sebagai lambang kehormatan dan semangat juang.

Secara historis, Aceh pernah mencapai masa kejayaan sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam menempatkan dirinya sejajar dengan kekuatan besar dunia Islam seperti Kesultanan Utsmani dan Maroko (M. Junus Djamil, 2000: 9). Kesultanan ini merupakan hasil federasi dari kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, antara lain Peureulak, Samudera Pasai, Lamuri, dan Pedir.

Sikap keras masyarakat Aceh terhadap kekuasaan asing tercermin dalam Perang Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade sejak 1873 hingga 1903. Penangkapan Sultan Muhammad Daud Syah pada tahun 1903 tidak serta-merta mengakhiri perlawanan rakyat Aceh. Bahkan setelah diasingkannya sang Sultan ke Batavia, perjuangan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan ulama dan panglima-panglima sagi yang gigih menentang dominasi kolonial Belanda. Sumber-sumber Belanda sendiri mengakui bahwa konflik Aceh berlangsung selama sekitar 70 tahun, menjadikannya salah satu bentuk perlawanan terpanjang dalam sejarah kolonialisme di Nusantara (M. Junus Djamil, 2000: 16).

Menurut Hasan Tiro, tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kegagalan Belanda menguasai Aceh secara total serta ketiadaan penyerahan kedaulatan secara formal dari Sultan Aceh memperkuat legitimasi Aceh sebagai entitas politik yang sah dalam perspektif hukum internasional.

Dinamika Perlawanan: Fisik dan Politik

Perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan berlangsung dalam dua bentuk utama:

1. **Perlawanan fisik**, berupa aksi bersenjata yang dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat melalui perang gerilya, baik secara kolektif maupun individual.
2. **Perlawanan politik**, yang diekspresikan dalam pembangunan kembali lembaga pendidikan Islam (dayah) dan pendirian organisasi kemasyarakatan sebagai saluran ideologis perjuangan (Hasjmy, 1997: 107).

Salah satu tonggak penting perlawanan politik adalah terbentuknya organisasi **Syarikat Islam** di Aceh pada tahun 1914, yang dipimpin oleh Abdul Manaf. Organisasi ini mendapat dukungan luas dari para ulama dan mantan pejuang gerilya. Dayah sebagai pusat pendidikan Islam difungsikan tidak hanya sebagai

lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai basis penyebaran nilai-nilai syariat dan semangat kebangsaan.

Namun, keberadaan Syarikat Islam dan aktivitasnya dalam menumbuhkan kesadaran politik rakyat menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah keterlibatan sejumlah tokohnya dalam pemberontakan Bakongan tahun 1925–1926, pemerintah kolonial menyatakan organisasi ini sebagai kelompok terlarang. Meskipun demikian, semangat perlawanan tidak surut. Para tokoh masyarakat dan ulama kemudian membentuk berbagai organisasi sosial-keagamaan yang secara de facto berfungsi sebagai saluran politik terselubung. Fokus utama mereka adalah mengembangkan pendidikan Islam dan membangkitkan kesadaran keagamaan serta nasionalisme di kalangan masyarakat (Hasjmy, 1997: 1120).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Daud Beureueh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam aspek militer, politik, maupun sosial keagamaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih menghadapi ancaman dari pihak kolonial Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Nusantara. Dalam konteks ini, peran tokoh-tokoh daerah seperti Daud Beureueh menjadi sangat penting, terutama di wilayah Aceh yang dikenal memiliki tradisi perlawanan yang kuat terhadap penjajah.

Sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Daud Beureueh berhasil membangun stabilitas wilayah melalui sejumlah inisiatif strategis. Ia memimpin proses integrasi kekuatan laskar perjuangan ke dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dilaksanakan melalui seleksi ketat guna menjamin profesionalisme dan disiplin militer. Selain itu, ia menggagas penggalangan dana dari masyarakat Aceh untuk pembelian pesawat Seulawah sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pertahanan Republik Indonesia.

Keberhasilan Daud Beureueh juga terlihat dalam kemampuannya meredam gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas daerah, seperti propaganda negatif yang disebarkan oleh kelompok Sayid Ali Alsagaf. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kepemimpinan keagamaan dan sosial yang memperkuat semangat nasionalisme rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penelitian ini menegaskan pentingnya mengkaji ulang peran-peran tokoh daerah dalam sejarah nasional agar generasi muda tidak kehilangan orientasi historis. Sebagaimana diungkapkan oleh Bung Karno melalui semboyan "*Jas Merah*" (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), pemahaman sejarah merupakan fondasi dalam membentuk karakter kebangsaan yang kuat.

Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat menjadi inspirasi bagi akademisi, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum untuk terus melestarikan semangat perjuangan bangsa serta memperkuat komitmen

dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah Taufik, 2002, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurahman Dudung, 2003, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta.
- Adan Hasanuddin Yusuf, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2014
- Ali Muhammad, 2006 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Amani
- Aman, 2015, Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Amelia F, 2008 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Jawa Tengah, ALPRIN, Amurwani Dwi Lestariningsih dan Sudirman AM, Sejarah Indonesia, Jakarta
- Arikunto Suharsimi, 1993 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Satriya, 2018 Teungku Muhammad Daud Beureuh Dan Revolusi Di Aceh 1945 -1950 Skripsi di Sumatera, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Djambatan Sugiyono, 2016 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Dzaelani Abdul Qadir, 2016 Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia, Jakarta, Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawarah.
- El Ibrahimy M.Nur, 1982 Tgk. Daud Beureueh Peraannya Dala Pergolakan Di Aceh, Jakarta, Gunung Agung.
- Latif Yudi, 2014 Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan, Jakarta, Mizan Media Utama.
- Nasution Harun dkk. 1992 Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta,
- Pane Neta S, 2001 Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian, Jakarta, PT. Grasindo, 2001
- Razali Mutiara Fahmi, 2014 Pergolakan Aceh Dalam perspektif Syariat, Banda Aceh, Penerbit Pane.
- Reid Anthony, 1987, Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan
- Suprpto HM Bibit, 2009 Ensiklopedia Ulama Nusantara, Jakarta, Gelar Media Indonesia
- Suryanegara Ahmad Mansur, 2016 Api Sejarah: Maha Karya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandung, Surya Dinasti.
- Syahrum dan Sallim, 2016 Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Citapustaka Media,
- Usman Abdullah Sani, 2010 Krisis Legitimasi Politik Dalam Sejarah Pemerintah di Aceh, Jakarta, Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI.

W.J.S Peorwardarminta, 1998 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Zallum Abdul Qadim, 2002 Sistem Pemerintahan Islam, Jatim, Al Izzah Bangil
Rahata Ringo, 2017 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Kalimantan Barat, Maraga Borneo Tarigas, Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.